

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Transportasi publik menjadi komponen yang sangat krusial dalam menunjang pergerakan masyarakat di wilayah perkotaan. Pada kota-kota metropolitan seperti Jakarta, keberadaan sistem transportasi yang dikelola secara optimal berperan penting dalam mendukung aktivitas sosial, kegiatan ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan. Menurut (Tamin, 2020), transportasi berfungsi sebagai media mobilitas manusia yang tidak hanya menghubungkan antarwilayah, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan tingkat produktivitas masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui inisiatif JakLingko berupaya mewujudkan sistem transportasi yang saling terhubung dengan menghadirkan layanan Mikrotrans JakLingko, yang berperan sebagai penghubung angkutan berkapasitas kecil ke jaringan moda utama seperti Transjakarta, MRT, dan LRT. Program ini dikembangkan untuk memberikan kualitas layanan yang lebih baik, biaya perjalanan yang terjangkau, serta penerapan sistem pembayaran non-tunai, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi (Suryani & Lubis, 2021).

Kehadiran layanan Mikrotrans diharapkan mampu menjadi solusi atas persoalan transportasi yang telah lama dihadapi Jakarta, seperti kemacetan lalu lintas serta tumpang tindih jalur antarmoda transportasi (Rahman, 2022). Akan tetapi, di sisi lain, pembaruan ini juga menimbulkan dampak sosial terhadap moda transportasi yang telah ada sebelumnya, terutama angkutan kota (angkot) konvensional yang selama bertahun-tahun menjadi sarana transportasi utama bagi masyarakat di wilayah permukiman. Hal ini selaras dengan temuan (Yuliani 2020)

dalam Jurnal Transportasi dan Kebijakan Publik, bahwa kebijakan transportasi baru seringkali menimbulkan dampak sosial bagi para sopir transportasi tradisional, terutama dalam konteks perubahan pola kerja, pendapatan, dan adaptasi terhadap sistem formal.

Dengan demikian, hadirnya Mikrotrans JakLingko tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis integrasi sistem transportasi, tetapi juga merepresentasikan adanya pergeseran dalam pola tata kelola pelayanan publik pada sektor transportasi perkotaan. Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan ini dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya pembaruan pelayanan publik yang berorientasi pada efisiensi serta pemerataan akses, sebagaimana dikemukakan oleh Osborne and Gaebler (1992) dalam karya *Reinventing Government*, bahwa birokrasi di era modern dituntut untuk mampu melakukan inovasi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif.

Perkembangan layanan transportasi publik di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk menghadirkan sistem transportasi yang berjalan secara efektif dan saling terhubung. Program JakLingko yang di inisiasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan bentuk kerja sama antara Dinas Perhubungan, PT Transportasi Jakarta (TransJakarta), MRT Jakarta, dan LRT Jakarta dengan tujuan menyatukan seluruh moda transportasi di wilayah ibu kota, termasuk angkutan berskala kecil seperti Mikrotrans. Menurut Rabbani dan Hanani (2024) dalam *Journal of Public and Management Review*, penerapan sistem ini dinilai mampu mendorong terwujudnya tata kelola transportasi perkotaan yang bersifat kolaboratif, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kehadiran Mikrotrans JakLingko tidak semata dipahami sebagai sebuah pembaruan dalam sektor transportasi, melainkan juga merepresentasikan bentuk tanggung jawab publik yang membawa dampak langsung terhadap perekonomian skala mikro, khususnya bagi para pengemudi angkot konvensional. Sebelum kebijakan integrasi ini diberlakukan, pengemudi angkot menjalankan aktivitas operasional secara mandiri dengan tingkat pendapatan yang sangat bergantung pada jumlah penumpang yang diperoleh setiap hari. Namun, setelah diterapkannya sistem Mikrotrans JakLingko yang didukung oleh skema subsidi serta regulasi pemerintah, muncul ketimpangan kondisi ekonomi antara pengemudi angkot konvensional dan pengemudi yang telah tergabung dalam jaringan JakLingko. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rahmadhan, Fatgepion, dan Kurniawan (2024) dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, yang mengungkapkan bahwa pengemudi angkot konvensional di Jakarta menghadapi tekanan ekonomi yang cukup signifikan sebagai dampak dari modernisasi sistem transportasi.

Transportasi publik merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan. Di kota metropolitan seperti Jakarta, keberadaan transportasi publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pelayanan publik yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas perkotaan, kebutuhan terhadap sistem transportasi yang tertata, aman, dan terintegrasi menjadi semakin penting.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian melakukan berbagai upaya pembenahan sistem transportasi publik melalui kebijakan integrasi transportasi yang dikenal dengan program JakLingko. Salah satu implementasi dari kebijakan

tersebut adalah penyediaan layanan Mikrotrans JakLingko yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik melalui sistem rute yang lebih terintegrasi, armada yang lebih layak, serta penggunaan sistem pembayaran non-tunai.

Kehadiran Mikrotrans JakLingko membawa perubahan pada pola pelayanan transportasi publik di Jakarta, khususnya pada moda transportasi skala kecil yang sebelumnya didominasi oleh angkutan kota (angkot) konvensional. Sebelum adanya program integrasi transportasi, angkot konvensional telah menjadi salah satu moda transportasi utama yang digunakan oleh masyarakat untuk menjangkau berbagai wilayah permukiman di Jakarta. Namun demikian, penerapan sistem Mikrotrans JakLingko juga memunculkan dinamika baru dalam sistem transportasi perkotaan. Perubahan sistem operasional, pola pelayanan, serta integrasi rute transportasi menyebabkan terjadinya pergeseran dalam pola penggunaan transportasi oleh masyarakat. Kondisi tersebut secara tidak langsung memengaruhi keberlangsungan operasional angkot konvensional yang masih beroperasi di luar sistem integrasi transportasi.

Bagi sebagian pengemudi angkot konvensional, perubahan sistem transportasi ini menimbulkan berbagai tantangan baru, terutama berkaitan dengan penurunan jumlah penumpang serta perubahan pola kerja yang sebelumnya bergantung pada sistem setoran dan jumlah penumpang harian. Situasi tersebut mendorong para pengemudi untuk melakukan berbagai bentuk penyesuaian agar tetap dapat mempertahankan keberlangsungan pekerjaan mereka di tengah perubahan sistem transportasi yang berlangsung.

Dalam perspektif manajemen perubahan, transformasi sistem transportasi dari pola operasional konvensional menuju sistem transportasi yang lebih terintegrasi merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dan sistem pelayanan publik. Perubahan kebijakan transportasi tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan ekonomi bagi kelompok masyarakat yang terlibat secara langsung dalam sistem transportasi tersebut, termasuk pengemudi angkot konvensional.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mengenai bagaimana kebijakan Mikrotrans JakLingko memengaruhi keberlangsungan angkot konvensional, khususnya di wilayah yang masih memiliki aktivitas operasional angkot yang cukup tinggi. Wilayah Cililitan, Jakarta Timur, menjadi salah satu kawasan yang mengalami perubahan sistem transportasi tersebut karena menjadi titik pertemuan berbagai moda transportasi serta menjadi salah satu jalur operasional angkot konvensional dan Mikrotrans JakLingko.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan Mikrotrans JakLingko dengan melihat bagaimana perubahan sistem transportasi tersebut memengaruhi keberlangsungan operasional angkot konvensional serta bagaimana para pengemudi angkot melakukan strategi adaptasi dalam menghadapi perubahan sistem transportasi yang terjadi.

Selain dari aspek ekonomi, perubahan dalam sistem transportasi ini turut memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial dan psikologis para pengemudi di lapangan. Pengemudi angkot Konvensional yang selama ini menggantungkan penghidupan pada pola operasional tradisional harus berhadapan dengan situasi yang tidak pasti serta perubahan preferensi pengguna transportasi umum.

Berkurangnya jumlah penumpang dan adanya dorongan untuk masuk ke dalam sistem yang baru memunculkan rasa cemas terhadap keberlangsungan mata pencaharian. Sebaliknya, pengemudi Mikrotrans JakLingko dihadapkan pada tuntutan profesionalisme, penerapan aturan jam kerja yang lebih terstruktur, serta mekanisme evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala. Saleh, Meutia, dan Anggraini (2023) dalam Journal Artesis mengemukakan bahwa meskipun penerapan sistem Mikrotrans mampu meningkatkan efisiensi layanan, kesenjangan dalam proses adaptasi masih dirasakan oleh pengemudi transportasi lokal. Dari sudut pandang Administrasi Publik, fenomena ini mencerminkan adanya tantangan dalam proses implementasi kebijakan publik yang secara langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat kelas pekerja.

Secara normatif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan pengaturan mengenai operasional Mikrotrans JakLingko melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Transportasi Terpadu dan Terintegrasi, serta Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Kedua ketentuan tersebut menegaskan posisi Mikrotrans JakLingko sebagai moda pengumpan (*feeder*) dalam sistem transportasi JakLingko. Namun demikian, pada tataran implementasi, regulasi tersebut belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan bagi angkutan kota konvensional yang belum tergabung, sehingga memunculkan ketimpangan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, di lapangan.

Dari sudut pandang pelayanan publik, kehadiran Mikrotrans JakLingko membawa peningkatan yang cukup berarti terhadap mutu layanan transportasi, seperti keteraturan jalur, aspek keselamatan, kenyamanan pengguna, serta efisiensi

biaya perjalanan. Hal ini selaras dengan prinsip *public service delivery* yang dikemukakan oleh *Osborne and Gaebler* (1992) dalam buku *Reinventing Government*, yang menekankan pentingnya inovasi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Meskipun demikian, dalam perspektif Administrasi Publik, inovasi dalam pelayanan tidak seharusnya mengabaikan kesejahteraan kelompok masyarakat yang terdampak oleh kebijakan tersebut, termasuk pengemudi angkot konvensional yang merupakan bagian dari ekosistem transportasi perkotaan. Penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan karena menempatkan pengemudi angkot konvensional sebagai fokus kajian, mengingat kelompok ini kerap terpinggirkan dalam proses evaluasi kebijakan transportasi.

Peralihan dari angkutan konvensional menuju sistem Mikrotrans JakLingko dapat dipahami melalui kerangka perubahan yang dikemukakan oleh *Black dan Gregersen*. Menurut *Black dan Gregersen*, perubahan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu perubahan antisipatif, reaktif, dan krisis. Dalam konteks transformasi dari angkot konvensional ke sistem Mikrotrans dalam program JakLingko, perubahan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai perubahan yang bersifat antisipatif dan reaktif, bukan sebagai perubahan yang bersifat krisis.

Peralihan dari angkutan konvensional menuju sistem Mikrotrans JakLingko menjadi salah satu langkah strategis yang ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik agar lebih efektif, aman, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk perubahan yang bersifat antisipatif dan reaktif, sebagaimana dijelaskan dalam teori perubahan yang dikemukakan oleh *Black dan Gregersen*. Pemerintah melakukan langkah antisipatif dengan

merancang sistem transportasi yang saling terintegrasi, menyediakan armada dengan fasilitas pendingin udara, menerapkan mekanisme pembayaran non-tunai, serta menetapkan skema pendapatan tetap bagi para pengemudi. Langkah-langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi menurunnya minat masyarakat terhadap transportasi umum yang sebelumnya dipersepsikan kurang tertata, tidak nyaman, dan belum efisien.

Perubahan yang bersifat antisipatif dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai langkah pembenahan terhadap sistem transportasi publik yang sebelumnya dinilai belum efisien dan kurang memberikan kenyamanan. Pemerintah kemudian merancang sistem Mikrotrans dengan pola rute yang saling terhubung, skema penghasilan tetap bagi pengemudi, penggunaan armada berpendingin udara, serta penerapan metode pembayaran non-tunai guna menjawab tuntutan transportasi perkotaan yang modern. Langkah tersebut merupakan bentuk pencegahan agar layanan angkutan umum tidak semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Pengguna menunjukkan apresiasi yang tinggi terhadap sistem yang memungkinkan perpindahan antarmoda tanpa dikenakan biaya tambahan, khususnya melalui penerapan tarif flat dan penggunaan kartu JakCard. Selain itu, kawasan yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan transportasi umum, seperti Jalan Kerja Bakti, kini mulai dilayani melalui pembukaan rute Mikrotrans JakLingko yang baru.

Namun di sisi lain, para pengemudi angkot konvensional melakukan respons perubahan yang bersifat reaktif dalam menyikapi kebijakan baru tersebut. Banyak di antara mereka yang harus menyesuaikan cara kerja, pola operasional, bahkan melakukan penyesuaian rute agar tetap mampu bersaing dan bertahan di tengah

dinamika perubahan yang berlangsung cepat. Bagi sebagian pengemudi, keberadaan Mikrotrans JakLingko menimbulkan tekanan karena berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan akibat berkurangnya jumlah penumpang. Meskipun demikian, terdapat pula pengemudi yang berupaya tetap bertahan dengan meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga kenyamanan penumpang, serta menjalin kerja sama antar sesama pengemudi agar tetap memperoleh penghasilan harian.

Sejumlah penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa proses modernisasi sistem transportasi seperti Mikrotrans JakLingko membawa konsekuensi sosial dan ekonomi yang bersifat kompleks. Ramadhan, *Fatgehipon*, dan Kurniawan (2024) menyatakan bahwa pengemudi angkot konvensional menghadapi tantangan yang cukup besar, baik dari sisi regulasi maupun dalam proses adaptasi terhadap sistem transportasi berbasis digital. Mereka menekankan bahwa keberlanjutan angkot konvensional sangat ditentukan oleh kemampuan para pengemudi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan serta tuntutan pasar. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Aliansi (2025) mengungkapkan bahwa proses transisi ini tidak hanya memerlukan penyesuaian teknis semata, tetapi juga membutuhkan dukungan moral, program pelatihan, serta komunikasi yang intensif antara pemerintah dan para pengemudi transportasi di lapangan.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kebijakan transportasi publik seperti JakLingko memiliki dua sisi yang saling beriringan. Di satu sisi, program tersebut terbukti mampu meningkatkan efektivitas serta kenyamanan dalam pelayanan publik. Namun di sisi lain, muncul berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang harus dihadapi oleh para pengemudi angkot konvensional sebagai bagian dari

transportasi rakyat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dinamika yang terjadi di lapangan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan transportasi yang lebih adil, berorientasi pada nilai kemanusiaan, dan berkelanjutan.

**Tabel 1. 1** Perubahan Moda Transportasi

Aspek	Sebelum JakLingko (Angkot Konvensional)	Sesudah JakLingko (Mikrotrans JakLingko)
Kenyamanan	Tidak ber-AC, ngetem sembarangan.	Ber-AC, rute tetap, tidak ngetem.
Akses	Tidak menjangkau.	Menjangkau.
WaktuTempuh	Lebih lama dan banyak peraturan.	Lebih cepat karena memiliki rute yang lebih terstruktur.
Pembayaran	Tunai Ke Sopir.	Non-tunai, menggunakan Kartu Uang Elektronik (JakCard)

(Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025)

**Tabel 1. 2** Jumlah Unit Angkot Mikrotrans dan Angkot Konvensional

Total Unit Angkot Mikrotrans JakLingko di Kota Jakarta Timur	Total Unit Angkot Konvensional di Kota Jakarta Timur
Terhitung total dari Tahun 2024-tahun 2025, terdapat 2.867 unit Mikrotrans JakLingko.	Pada Tahun 2015, jumlah angkot di wilayah jabodetabek mencapai sekitar 24 ribu unit. Pemerintah menggantikan 100 unit angkot untuk menjadikan Angkot Mikrotrans JakLingko.

(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2025)

**Tabel 1. 3** Rute Mikrotrans JakLingko di Wilayah Cililitan

No	Track/Jalur Perjalanan	Daerah yang dilalui	Daerah yang dilalui
1	JAK – 21	PGC – Dwikora	Cililitan, PGC, Dwikora
2	JAK – 22	Penas Kalimalang – Dwikora	Panas Kalimalang, Cililitan, Dwikora

3	JAK – 36	Cilangkap – Cililitan	Cilangkap, Makasar, Cililitan
4	JAK – 37	Cililitan – Condet	Cililitan, Batu Ampar Condet
5	JAK – 108	Komplek Dirgantara – Cililitan	Komplek Dirgantara, Halim, Celilitan

(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2025)

Peralihan dari angkutan konvensional menuju sistem Mikrotrans melalui pendekatan strategi perubahan menurut Kurt Lewin menggambarkan bahwa proses perubahan sosial dan organisasi berlangsung dalam tiga tahapan, yaitu *unfreeze*, *change*, dan *refreeze*. Ketiga tahapan tersebut terlihat secara jelas dalam penerapan sistem Mikrotrans JakLingko, khususnya pada layanan Mikrotrans. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pengguna Mikrotrans untuk mengidentifikasi perubahan signifikan yang dirasakan secara langsung.

Tahap *unfreeze* (mencairkan) menunjukkan bahwa pemerintah menyadari sistem angkutan kota konvensional sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Kondisi seperti jadwal yang tidak menentu, kelayakan kendaraan yang rendah, penggunaan sistem pembayaran tunai, serta perilaku mengemudi yang kurang aman menjadi faktor utama yang mendorong perlunya perubahan. Kesadaran tersebut kemudian direspons dengan upaya membangun pemahaman publik bahwa dibutuhkan sistem transportasi baru yang lebih aman, nyaman, dan tertata. Melalui Peraturan Gubernur yang ditetapkan pada 15 Juli 2020, yaitu Pergub Nomor 63 Tahun 2020, sistem JakLingko mulai diperkenalkan secara resmi sebagai wujud komitmen pemerintah dalam melakukan transformasi transportasi.

Tahap *Change* (masa transisi atau perubahan). Pada tahap ini, sistem Mikrotrans diperkenalkan sebagai bentuk perubahan nyata. Kendaraan dilengkapi AC, rute lebih terstruktur, sopir digaji tetap, dan pembayaran dilakukan secara non tunai.

Masyarakat mulai mengalami perubahan cara naik transportasi umum, termasuk berhenti hanya di halte, tidak lagi membayar sopir secara langsung, dan menggunakan kartu elektronik. Wawancara pengguna menunjukkan adanya proses adaptasi, seperti kebingungan awal soal rute atau belum terbiasa dengan sistem e-money, tapi perlahan mulai terbiasa karena manfaat kenyamanan dan ketertiban yang lebih tinggi.

Tahap *Refreeze* (membekukan). Setelah masyarakat semakin terbiasa dan menerima sistem baru tersebut, pola penggunaan Mikrotrans mulai menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Pengguna merasa lebih aman, nyaman, dan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap layanan publik. Perubahan tersebut kemudian menguat dan berkembang menjadi kebiasaan serta nilai baru dalam mobilitas perkotaan. Tahap *refreeze* tercapai ketika perubahan telah diterima secara luas dan menjadi praktik yang mapan. Masyarakat menilai sistem ini lebih tertib dan profesional, yang diperkuat oleh dukungan regulasi melalui Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2021. Regulasi tersebut mempertegas standar pelayanan, pengelolaan armada, serta pengaturan jam operasional, sehingga mempercepat terbentuknya budaya baru dalam mobilitas warga Jakarta. Pergub ini mengatur berbagai aspek layanan, mulai dari jenis pelayanan, indikator kinerja, hingga standar kenyamanan dan keselamatan, termasuk pengelolaan armada, halte, waktu operasional, serta aksesibilitas. Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, terjadi perubahan yang nyata dalam sistem transportasi perkotaan, khususnya pada layanan moda transportasi yang sebelumnya bersifat konvensional. Armada Mikrotrans kini dilengkapi fasilitas pendingin udara, tempat duduk yang layak, serta tidak lagi menerapkan praktik menunggu penumpang (*ngetem*).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana dampak kehadiran Mikrotrans JakLingko terhadap kondisi sosial ekonomi serta strategi adaptasi sopir angkot Konvensional dan Mikrotrans dalam menghadapi perubahan kebijakan transportasi terintegrasi di wilayah Cililitan, Jakarta Timur?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh pengemudi angkot konvensional akibat hadirnya Mikrotrans JakLingko di wilayah Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan menelusuri berbagai bentuk penyesuaian serta strategi bertahan yang dilakukan oleh pengemudi angkot konvensional, sekaligus memahami pandangan dan pengalaman pengemudi Mikrotrans terkait perubahan sistem kerja, tingkat pendapatan, serta kebijakan transportasi publik yang diterapkan oleh pemerintah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini memberikan beberapa manfaat yang bisa digolongkan menjadi 3 bagian yaitu:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam bidang Administrasi Publik, khususnya dalam pembahasan tentang kebijakan publik dan pengelolaan transportasi di kota besar seperti Jakarta. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kebijakan transportasi terintegrasi seperti JakLingko memengaruhi para sopir di lapangan, terutama sopir angkot Konvensional dan sopir

Mikrotrans. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi atau rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam tentang dampak sosial dan ekonomi kebijakan transportasi terhadap masyarakat pekerja sektor informal.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dalam memperbaiki dan mengembangkan kebijakan transportasi yang lebih adil dan berpihak pada semua pihak, termasuk sopir angkot yang terdampak langsung oleh kehadiran Mikrotrans. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran bagi operator transportasi dan pihak swasta untuk membangun sistem kerja sama yang lebih baik, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Bagi kalangan akademik, penelitian ini bisa menjadi bahan pembelajaran tentang dinamika sosial dan ekonomi di balik kebijakan publik yang diterapkan di sektor transportasi.

#### **1.4.3 Manfaat Sosial**

Dari sisi sosial, penelitian ini diharapkan dapat membuka pemahaman masyarakat tentang kondisi nyata para sopir angkot dan sopir Mikrotrans yang setiap hari bekerja di jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan memahami tantangan dan perubahan yang mereka hadapi, diharapkan akan tumbuh rasa empati dan kesadaran bersama bahwa kebijakan transportasi sebaiknya tidak hanya fokus pada efisiensi dan teknologi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial serta kesejahteraan para pekerja di lapangan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB I

### PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai latar belakang masalah yang melandasi penelitian, serta alasan mengapa topik ini penting untuk dikaji.

Dalam bab ini dijelaskan pula rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis, praktis, maupun sosial, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal untuk memahami arah dan fokus penelitian mengenai dampak kehadiran Mikrotrans JakLingko terhadap keberlangsungan angkot Konvensional di wilayah Jakarta Timur.

### BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, seperti teori kebijakan publik, teori perubahan sosial ekonomi, teori pelayanan publik, serta konsep adaptasi sosial para sopir transportasi. Selain itu, bab ini juga memaparkan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Di akhir bab, penulis menyusun kerangka berpikir

(*framework*) yang menjadi dasar analisis dalam menelaah kebijakan hubungan transportasi antara Mikrotrans JakLingko dan dampaknya terhadap keberlangsungan angkot Konvensional di Jakarta Timur.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif deskriptif. Penjelasan dalam bab ini mencakup lokasi dan waktu penelitian, subjek atau informan penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Selain itu, bab ini juga memaparkan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas hasil penelitian, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode.

### **BAB IV**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas hasil penelitian bahwa kebijakan Mikrotrans Jaklingko berhasil meningkatkan integrasi dan keteraturan sistem transportasi perkotaan serta memberikan manfaat nyata bagi

masyarakat sebagai pengguna layanan. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya berdampak adil karena pengemudi angkot konvensional mengalami penurunan pendapatan dan tekanan sosial, sementara pengemudi Mikrotrans Jaklingko memperoleh kepastian ekonomi yang lebih baik. Pengemudi

angkot konvensional melakukan berbagai strategi adaptasi untuk bertahan, meskipun peluang adaptasi belum merata. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendukung berupa skema transisi dan perlindungan ekonomi agar implementasi sistem transportasi publik dapat berjalan secara lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab V merupakan penutup yang memuat simpulan dan saran. Pada bab ini, penulis merangkum hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah terkait evaluasi kebijakan Mikrotrans JakLingko terhadap keberlangsungan angkutan kota konvensional di wilayah Cililitan, Jakarta Timur. Selain itu, disajikan saran teoretis dan praktis.